

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Sebagai negara kepulauan, Indonesia secara geografis terletak di garis khatulistiwa, di antara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia. Antara dua samudera yaitu samudera Pasifik dan Samudera Hindia, serta pada pertemuan antara tiga lempeng tektonik besar dunia, yaitu Lempeng Australia, Lempeng Eurasia, dan Lempeng Pasifik. Sebagai negara tropis yang hanya memiliki 2 musim yaitu musim hujan dan musim kemarau serta letak geografis Indonesia tersebut mengakibatkan Indonesia sebagai wilayah yang sangat rawan terhadap bencana alam.

Indonesia sebagai negara beriklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau yang menyebabkan beberapa bencana terkait yang tidak dapat dihindari. Jika musim kemarau bencana yang muncul dan sering terjadi di beberapa daerah di Indonesia yaitu bencana kekeringan dan kenaikan suhu dapat menyebabkan kebakaran di hutan, lahan, dan rumah, serta kekurangan air bersih. Ketika musim hujan dengan Curah hujan yang tinggi, hutan yang gundul, dan pengelolaan lingkungan yang buruk dapat menyebabkan banjir, banjir bandang dan tanah longsor. Indonesia banyak mengalami bencana. Bencana alam yang sering terjadi di Indonesia yaitu cuaca ekstrim, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/pemukiman, angin puting beliung dan bencana lainnya.

Dilansir dari [Kompas.com](https://www.kompas.com) menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) pada 2022, telah terjadi sebanyak 3.542 kejadian bencana alam di Indonesia, yang terdiri dari bencana gempa bumi sebanyak 28 kejadian, bencana banjir dengan 1.530 kejadian, cuaca ekstrem sebanyak 1.067 kejadian, bencana tanah longsor dengan 634 kejadian, kebakaran hutan lahan dengan 252 kejadian, gelombang pasang dan abrasi 26 kejadian serta kekeringan 4 kejadian. Kemudian sejak 1 Januari sampai 7 Maret 2023, di Indonesia telah terjadi 564 kejadian bencana, yang terdiri dari bencana banjir sebanyak 233 kejadian, 183 peristiwa cuaca ekstrem, 97 tanah longsor, 32 kebakaran hutan dan lahan, 9 kejadian gempa bumi, 9 gelombang pasang/abrasi dan 1 erupsi gunung api (Aditya, 2023).

Fenomena La Nina tiga tahun beruntun atau *triple-dip* yang telah ada di Indonesia sejak 2020, berlanjut 2021 hingga 2022, dan akan berakhir di awal 2023. Fenomena La Nina merupakan fenomena penurunan suhu atau pendinginan dibawah kondisi normal suhu di permukaan laut di Samudera Pasifik bagian tengah yang kemudian berinteraksi dengan atmosfer dan menentukan pergerakan angin atau dengan kata lain mengurangi potensi pertumbuhan awan di Samudera Pasifik tengah dan meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia. Fenomena La Nina menyebabkan bencana hidrometeorologi yang bentuknya seperti curah hujan meningkat, banjir, longsor, dan angin kencang/angin puting beliung. Dilansir dari [SINDOnews.com](https://www.sindonews.com) BNPB menyebutkan 4 Provinsi rawan bencana hidrometeorologi basah akibat fenomena La Nina, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Di Jawa Tengah Kabupaten/Kota yang berpotensi terjadi bencana adalah Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas dan Kota Semarang (Mufarida, 2021).

Dikutip dari [KOMPAS.com](https://www.kompas.com), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah mencatat sebanyak 1.798 kejadian terjadi di Jawa Tengah sepanjang Januari hingga 11 Oktober 2022. Dari jumlah kejadian tersebut, tanah longsor menjadi kejadian yang paling sering terjadi, yaitu sebanyak 719 kejadian, diikuti dengan kejadian angin atau puting beliung sebanyak 548 kali, banjir 253 kejadian, dan kebakaran 240 kejadian di berbagai daerah di Jawa Tengah. Berdasarkan berita tersebut maka bencana yang sering terjadi di Jawa Tengah pada tahun 2022 adalah bencana tanah longsor dengan 719 kejadian (Fauziyah, 2022). Banyaknya kejadian bencana tanah longsor yang terjadi di Jawa Tengah bukan suatu hal yang baru karena Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi mengalami bencana tanah longsor dikarenakan bentuk morfologi yang bervariasi yaitu seperti dataran tinggi serta perbukitan.

Berikut ini akan disajikan data bencana tanah longsor di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah dalam angka tahun 2018-2022, yang disajikan dalam tabel.

Tabel 1.1
Data Jumlah Kejadian Bencana Tanah Longsor Menurut Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota	Tahun					Jumlah
	2018	2019	2020	2021	2022	
Kabupaten Cilacap	32	19	30	24	15	120
Kabupaten Banyumas	22	23	18	23	11	97
Kabupaten Purbalingga	2	6	9	5	2	24
Kabupaten Banjarnegara	89	32	5	12	9	147
Kabupaten Kebumen	12	1	4	6	5	28
Kabupaten Purworejo	25	14	3	5	2	49
Kabupaten Wonosobo	26	4	5	9	12	56
Kabupaten Magelang	88	25	7	26	6	152
Kabupaten Boyolali	14	4	-	4	1	23
Kabupaten Klaten	5	1	-	-	1	7
Kabupaten Sukoharjo	1	-	-	1	-	2
Kabupaten Wonogiri	25	12	8	9	2	56
Kabupaten Karanganyar	14	4	7	4	2	31
Kabupaten Sragen	8	7	-	3	3	21
Kabupaten Grobogan	-	4	1	5	2	12
Kabupaten Blora	2	1	1	3	3	10
Kabupaten Rembang	1	-	2	1	2	6
Kabupaten Pati	5	3	2	-	-	10
Kabupaten Kudus	9	3	3	2	2	19
Kabupaten Jepara	12	10	5	8	4	39
Kabupaten Demak	1	-	-	-	-	1
Kabupaten Semarang	3	10	2	7	1	23
Kabupaten Temanggung	29	29	8	15	18	99
Kabupaten Kendal	12	6	9	8	7	42
Kabupaten Batang	3	1	-	2	1	7
Kabupaten Pekalongan	18	2	2	-	-	22
Kabupaten Pemalang	4	1	1	1	2	9
Kabupaten Tegal	14	2	15	7	5	43
Kabupaten Brebes	24	18	-	13	16	71
Kota Magelang	-	-	-	-	-	-
Kota Surakarta	-	-	-	3	1	4
Kota Salatiga	-	-	-	-	-	-
Kota Semarang	53	42	24	31	12	162
Kota Pekalongan	2	-	1	1	-	4
Kota Tegal	-	-	-	-	-	-
Total Kejadian	555	284	172	238	147	1396

Sumber: Data diolah dari BPS Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2019-2023

Dari tabel 1.1 tentang data jumlah kejadian bencana tanah longsor menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2022 dapat diketahui bahwa Kota Semarang menjadi daerah atau wilayah menduduki peringkat pertama dengan kejadian bencana tanah longsor terbanyak di Jawa Tengah sepanjang 5 tahun yaitu dari tahun 2018 sampai tahun 2022 dengan total 162 kejadian, yang kemudian diikuti wilayah Kabupaten Magelang dengan jumlah 152 kejadian serta wilayah Kabupaten Banjarnegara dengan jumlah kejadian bencana tanah longsor sebanyak 147 kejadian.

Jumlah kejadian tanah longsor yang disebutkan dalam berita sebelumnya dan yang tercatat di BPS berbeda karena yang tercatat di BPS merupakan kejadian bencana yang terjadi di lebih dari satu wilayah administrasi terdampak, kejadian bencana yang dihitung adalah kejadian bukan berdasarkan wilayah administrasi, sehingga jika satu kejadian bencana berdampak pada lebih dari satu wilayah administrasi, maka pencatatan kejadian bencana tetap ditulis satu kejadian bencana. Dari hal tersebut menjelaskan bahwa seringkali terjadi bencana tanah longsor di Kota Semarang pada rentang 5 tahun yaitu dari tahun 2018 sampai 2022 dibandingkan daerah lainnya.

Kota Semarang merupakan salah satu Kota di Indonesia yang memiliki potensi terjadinya beberapa bencana. Secara topografi Kota Semarang terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi topografi Kota Semarang menunjukkan adanya berbagai kemiringan dan tonjolan. Kondisi ini membuat Kota Semarang rentan terhadap berbagai bencana, diantaranya yaitu bencana banjir, rob, tanah longsor, puting beliung, kekeringan, abrasi, kebakaran lahan, dan potensi bencana lain. Ada beberapa sifat tanah di Kota Semarang, yaitu tanah bergerak di Kota Semarang bagian atas dan penurunan tanah di Kota Semarang bagian bawah. Seperti yang diketahui bahwa daerah labil atau tanah gerak, rawan akan tanah longsor. Sedangkan penurunan tanah salah satu faktor penyebab terjadinya banjir rob. Kota Semarang memang wilayah yang berlangganan banjir atau sering terjadi banjir dan banjir rob terurama di Kota Semarang bagian bawah dan tanah longsor di Kota Semarang bagian atas.

Berikut ini akan disajikan data bencana yang terjadi di Kota Semarang Tahun 2018-2022.

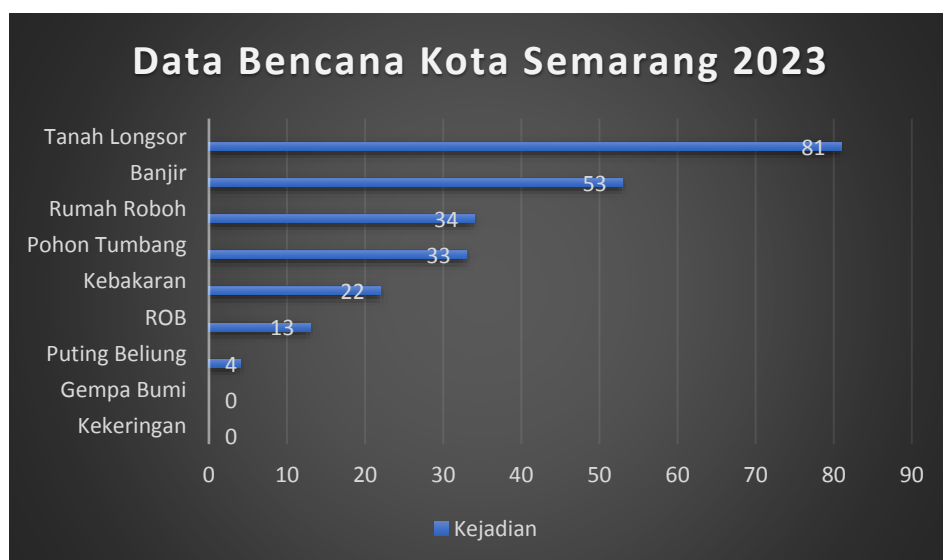
Tabel 1.2**Data Bencana di Kota Semarang Tahun 2018-2022**

Tahun	Jenis Bencana							Total
	Banjir	Rob	Tanah Longsor	Puting Beliung	Rumah Roboh	Kebakaran	Pohon Tumbang	
2018	36	-	82	5	31	69	45	268
2019	18	-	83	20	52	102	45	320
2020	23	-	175	10	46	42	46	342
2021	88	2	146	37	35	46	78	432
2022	63	7	110	28	50	39	46	343
Total	228	9	596	100	214	298	260	1705

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang

Berdasarkan tabel 1.2 tentang data bencana yang terjadi di Kota Semarang tahun 2018-2022 dapat diketahui bahwa bencana yang paling sering terjadi atau menempati peringkat pertama dengan bencana terbanyak yaitu bencana tanah longsor dengan 596 kejadian di sepanjang tahun 2018-2022. Kemudian diikuti selanjutnya bencana kebakaran dengan 298 kejadian, bencana banjir dengan 228 kejadian, pohon tumbang sebanyak 260 kejadian, rumah roboh dengan 214 kejadian, puting beliung 100 kejadian dan rob dengan 9 kejadian dalam tahun 2021 dan 2022. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Kota Semarang menjadi salah satu daerah yang memiliki potensi rawan bencana di Jawa Tengah terutama bencana tanah longsor. Data tersebut juga mendukung data yang sebelumnya sudah disebutkan bahwa bencana tanah longsor menjadi bencana yang sering terjadi dan menunjukkan bahwa Kota Semarang rawan terhadap bencana tanah longsor.

Data yang sudah disajikan sebelumnya merupakan data di tahun-tahun sebelumnya. Dikutip dari web BPBD Kota Semarang yaitu bpbd.semarangkota.go.id, di tahun ini yaitu tahun 2023 sudah terjadi beberapa kali bencana di Kota Semarang. Di bawah ini akan disajikan data terbaru mengenai bencana yang terjadi di Kota Semarang dari awal Januari 2023 sampai 17 April 2023. Yang akan disajikan dalam bentuk gambar diagram bar sebagai berikut:

Gambar 1.1**Diagram Data Bencana Kota Semarang Tahun 2023****(1 Januari-17 April 2023)**

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang

Dari gambar 1.1. tentang data bencana Kota Semarang tahun 2023, meninformasikan mengenai bencana yang terjadi di Kota Semarang dari awal tahun sampai pertengahan bulan April. Dapat diketahui bahwa bencana tanah longsor menempati peringkat 1 dengan kejadian terbanyak yang sudah terjadi yaitu sebanyak 81 kejadian. Diikuti oleh bencana banjir dengan 53 kejadian, rumah roboh dengan 34 kejadian, pohon tumbang dengan 33 kejadian, bencana kebakaran dengan 22 kejadian, Rob dengan 13 kejadian, puting beliung dengan 4 kejadian dan gempa bumi dengan 0 kejadian serta kekeringan dengan 0 kejadian. Data tersebut sebagai tambahan data yang sudah disajikan sebelumnya yang semakin memperkuat bahwa Kota Semarang memiliki potensi rawan bencana tanah longsor.

Kota Semarang terkenal dengan daerahnya yang rawan bencana. Daerah atau Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Suatu wilayah dikatakan rawan bencana apabila dalam jangka waktu tertentu memiliki kondisi dan karakter biologis, geologis, geografis, hidrologis, klimatologis, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan teknologi yang kurang

memiliki kemampuan untuk mencegah, meredam, dan mencapai kesiapan dalam menghadapi dampak buruk akibat bahaya bencana. Kawasan bencana di Kota Semarang terdiri dari kawasan rawan bencana rob, kawasan rawan bencana abrasi, kawasan rawan bencana banjir, kawasan rawan bencana gerakan tanah dan longsor, dan kawasan rawan bencana angin topan. Kawasan yang rawan longsor adalah kawasan lindung atau kawasan budidaya yang mencakup zona-zona yang berpotensi longsor.

Dibawah ini akan disajikan tabel data daerah rawan atau daerah yang memiliki potensi bencana tanah longsor Kota Semarang.

Tabel 1.3

Data Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor Kota Semarang

No.	Lokasi Kecamatan	Sebaran Kelurahan	Total Kelurahan
1.	Gajahmungkur	Lempongsari, Bendungan, Gajahmungkur, Petompon, Bendan Duwur, dan Bendan Ngisor	6
2.	Gunungpati	Sukorejo, Sadeng, dan Sekaran	3
3.	Candisari	Candu, Jatingaleh, Jomblang, Tegalsari, Wonotingal, dan Karanganyar Gunung	6
4.	Ngalian	Kalipancur, Purwoyoso, Wonosari, Bambankerep, Beringin, dan Ngalian	6
5.	Tugu	Mangkang Wetan dan Mangunharjo	2
6.	Tembalang	Meteseh, Tandang, Bulusan, dan Jangli	4
7.	Semarang Selatan	Mugassari, dan Randusari	2
8.	Semarang Barat	Ngemplak Simongan, Krapyak, Gisikdrono, dan Bongsari	4
9.	Banyumanik	Ngesrep, Tinjomoyo, Sronдол Kulon, dan Pudak Payung	4
Total			37

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang

Data pada tabel 1.3 tentang data daerah rawan bencana tanah longsor di Kota Semarang dapat diketahui bahwa daerah rawan tanah longsor terdiri dari 9 Kecamatan dan 37 kelurahan, yaitu terdiri dari Kec.Gajahmungkur dengan 6 Kelurahan yaitu Kel.Lemponsari, Kel.Bendungan, Kel.Gajahmungkur, Kel.Petompon, Kel.Bendan Duwur, dan Kel.Bendan Ngisor; kemudian Kec.Gunungpati yang terdiri dari 3 Kelurahan yaitu Kel.Sukorejo, Kel.Sadeng, dan Kel.Sekaran; selanjutnya yaitu Kec.Candisari yang terdiri dari 6 Kelurahan yaitu Kel.Candu, Kel.Jatingaleh, Kel.Jomblang, Kel.Tegalsari, Kel.Wonotingal, dan Kel.Karanganyar Gunung; kemudian Kec.Ngalian yang terdiri dari 6 Kelurahan yaitu Kel.Kalipancur, Kel.Purwoyoso, Kel.Wonosari, Kel.Bamankerep, Kel.Beringin, dan Kel.Ngalian; lalu Kec.Tugu yang terdiri dari 2 Kelurahan yaitu Kel. Mangkang Wetan dan Kel.Mangunharjo; kemudian Kec.Tembalang terdiri dari 4 Kelurahan yaitu Kel.Meteseh, Kel.Tandang, Kel.Bulusan, dan Kel.Jangli; kemudian Kec.Semarang Selatan yang terdiri dari 2 Kelurahan yaitu Kel.Mugassari dan Kel.Randusari; selanjutnya Kec.Semarang Barat yang terdiri dari 4 Kelurahan yaitu Kel.Ngemplak Simongan, Kec.Krapyak, Kec.Gisikdono,dan Kel.Bongsari; kemudian yang terakhir ada Kec.Banyumanik yang terdiri dari 4 Kelurahan yaitu Kel.Ngesrep, Kel.Tinjomoyo, Kel.Srondol Kulon, dan Kel.Pudak Payung. Demikian sebaran keluran kawasan rawan tanah longsor yang ada di Kota Semarang. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa kawasan rawan bencana tanah longsor di Kota Semarang cukup banyak yaitu terdiri dari 37 Kelurahan dari 9 Kecamatan.

Tanah longsor sering kali dipicu oleh kombinasi curah hujan yang tinggi, lereng yang curam, tanah yang kurang padat dan tebal, erosi, berkurangnya tutupan vegetasi, dan getaran. Tanah longsor adalah salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, atau percampuran keduanya, menurun atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Pada musim penghujan, potensi gerakan tanah / tanah longsor sering terjadi, tidak terkecuali di Kota Semarang. Definisi tanah longsor dengan gerakan tanah memiliki kesamaan. Tanah longsor/gerakan tanah adalah pergerakan massa tanah/batuan ke arah vertikal, horizontal atau miring dari posisi semula.

Dibawah ini akan disajikan gambar peta kerentanan bencana tanah longsor di Kota Semarang.

Gambar 1.2

Peta Kerentanan Bencana Tanah Longsor di Kota Semarang



Sumber: BPBD Kota Semarang

Berdasarkan gambar 1.2 tentang peta kerentanan bencana tanah longsor di Kota Semarang dapat diketahui bahwa Kota Semarang merupakan salah satu Kota yang rentan terhadap bencana tanah longsor. Dapat dilihat dari peta tersebut, terlihat ada beberapa daerah yang berstatus hijau, kuning hingga merah. Daerah dengan warna hijau merupakan daerah yang memiliki kerentanan longsor rendah. Kemudian daerah dengan warna kuning, merupakan daerah yang memiliki kerentanan longsor sedang. Serta daerah dengan warna merah, jelas merupakan daerah yang memiliki kerentanan longsor tinggi. Daerah yang berstatus kerentanan longsor tinggi yang ditandai dengan zona warna merah berada di beberapa titik atau beberapa Kelurahan disertai beberapa daerah zona kuning yaitu daerah kerentanan longsor sedang diantaranya yaitu Kelurahan Wonoplumbon Kecamatan Mijen, Kelurahan Kedungpani Kecamatan Mijen, Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunung Pati, Kelurahan Kandri Kecamatan Gunung Pati, Kelurahan Pongangan Kecamatan Gunung Pati, Kelurahan Kalisegoro

Kecamatan Gunung Pati, Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunung Pati, Kelurahan Srandol Kulon Kecamatan Banyumanik, Kelurahan Pudak Payung Kecamatan Banyumanik, Kelurahan Jabungan Kecamatan Gunung Pati. Kemudian untuk beberapa titik zona berwarna kuning dengan daerah kerentanan longsor sedang tersebar juga dititik atau daerah lain, yaitu diantaranya Kelurahan Gunung Pati Kecamatan Gunung Pati, Kelurahan Purwosari Kecamatan Mijen, Kelurahan Candi Kecamatan Candi, Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik, Kelurahan Ngesrep Kecamatan Banyumanik, Kelurahan Bulusan Kecamatan Temabalang, Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik, Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang, dll. Dari gambar peta tersebut diketahui bahwa Kota Semarang memiliki sebaran daerah dengan zona kerentana gerakan tanah tingkat menengah dan tinggi. Hal ini membuktikan bahwa Kota Semarang memiliki potensi bencana tanah longsor yang cukup tinggi dengan banyaknya daerah dengan kerentanan bencana tanah longsor sedang dan tinggi.

Merespon banyaknya kejadian bencana yang terjadi di Indonesia, maka pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam hal menanggulangi bencana. BNPB merupakan realisasi pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Pasal 18 dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2007 mengamanatkan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dikutip dari Renstra BPBD Kota Semarang Tahun 2016-2021, dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang yang berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana di Daerah, Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Perda Nomor 12 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penggulangan Bencana Daerah Kota Semarang dan Perda Nomor 13 tahun 2010

tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang, kemudian disusul dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 tahun 2010 penjabaran tugas dan fungsi Badan Penggulangan Bencana Daerah Kota Semarang (Semarang P. K., 2021-2026).

Dilihat dari tugas yang diemban oleh BPBD Kota Semarang, terlihat bahwa badan ini tidak hanya bertanggung jawab saat terjadi bencana, tetapi juga bertanggung jawab pada pra-bencana, saat bencana, dan pasca-bencana. Dalam pencegahan bencana, terdapat sistem penanggulangan bencana yang mempelajari langkah-langkah untuk mencegah terjadinya bencana, mengurangi dampak buruk atau kerugian yang ditimbulkan, tanggap darurat saat bencana terjadi, dan setelah bencana terjadi. Dalam menyelesaikan tugas-tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang diperlukan kinerja organisasi yang baik. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang tanggap dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dan harus mampu lebih proaktif dalam menanggapi permasalahan. Pada dasarnya setiap organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Bryson mengatakan bahwa kinerja organisasi merupakan hasil dari kegiatan kerjasama diantara para anggota dan komponen organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi (Sembiring, 2012). Kinerja organisasi merupakan salah satu hal yang penting dalam pelaksanaan pemerintahan dan menjadi salah satu sorotan permasalahan dalam birokrasi pemerintahan, karena menyangkut kesiapan dan profesionalisme.

Dalam mencapai suatu tujuan dan sasaran suatu organisasi atau program pasti terdapat adanya tantangan, hambatan, dan kendala dalam mencapai hal tersebut. Berdasarkan observasi peneliti BPBD Kota Semarang dalam penanggulangan bencana tanah longsor belum maksimal dilakukan karena masih terdapat kendala diantaranya masih kurangnya SDM, kurangnya sarana dan prasarana penunjang yang ada, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penanggulangan bencana, sarana dan prasarana kebencanaan yang belum memadai, masyarakat kurang tangguh terhadap bencana, dan lain-lainnya.

Secara umum kinerja organisasi dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya yaitu produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Dalam penelitian kinerja BPBD Kota Semarang, peneliti hanya menggunakan 3 aspek yaitu produktivitas, responsivitas dan akuntabilitas, karena 3 aspek tersebut selalu muncul dalam beberapa penelitian terdahulu mengenai kinerja organisasi. Aspek kinerja tersebut dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk melihat bagaimana kinerja BPBD dalam setiap proses penanggulangan bencana tanah longsor yang terjadi di Kota Semarang. Kinerja BPBD Kota Semarang dapat dikatakan berjalan baik apabila telah memenuhi aspek kinerja sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya. Kenyataannya BPBD Kota Semarang masih menemui berbagai hambatan dan kendala yang membuat kinerja dalam menanggulangi bencana tanah longsor belum optimal di beberapa aspek.

Produktivitas secara umum merupakan kemampuan dalam memperoleh hasil (*output*) yang optimal melalui penggunaan sumber daya (*input*) yang ada di dalam organisasi secara efektif dan efisien. Hasil atau *output* yang dimaksud dapat berupa program dan dokumen-dokumen terkait dengan upaya pengurangan risiko bencana. Program dalam penanggulangan bencana. Dokumen terkait dalam upaya penanggulangan bencana yang ada belum lengkap yaitu baru ada 1 yaitu dokumen kontijensi DAS Beringin, sedangkan untuk bencana tanah longsor belum ada dokumen kontijensinya. Dokumen kontijensi disusun bertujuan sebagai pedoman dalam penanganan darurat bencana, agar pada saat tanggap darurat dapat dikelola dengan cepat dan efektif serta sebagai dasar memobilisasi berbagai sumber daya para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Perencanaan kontijensi merupakan prasyarat bagi tanggap darurat yang cepat dan efektif. Tanpa perencanaan kontijensi sebelumnya, banyak waktu akan terbuang dalam beberapa hari pertama menanggapi keadaan darurat tersebut. BPBD Kota Semarang belum menyusun atau memiliki dokumen kontijensi dalam penanganan darurat bencana tanah longsor di Kota Semarang.

Resiko dari ancaman bencana tanah longsor di Kota Semarang dapat diminimalisir dengan adanya mitigasi dalam upaya penanggulangan bencana. Salah satu perencanaan mitigasi bencana di suatu wilayah dapat dilakukan dengan

pembuatan peta jalur evakuasi bencana. Jalur evakuasi bencana tanah longsor harus direncanakan dengan perhitungan tingkat ancaman longsor yang tinggi sampai ke wilayah yang tingkat ancaman longsornya paling rendah. Wilayah dengan tingkat ancaman longsor paling rendah dapat ditetapkan sebagai titik kumpul dari jalur evakuasi bencana. Jalur evakuasi sebagaimana yang dimaksud berupa jalan yang direncanakan sebagai jalur pelarian dari bencana alam menuju ruang evakuasi. Namun, peta evakuasi tanah longsor baru ada satu yaitu di Kelurahan Randusari Kecamatan Semarang Selatan. Sedangkan kelurahan lainnya yang rawan terjadi bencana tanah longsor belum ada.

Dalam tahap pra bencana diperlukan adanya peringatan dini atau yang biasa kita tahu dengan Early Warning System (EWS). Early Warning System (EWS) sebagai alat pendeteksi bencana tanah longsor atau alat peringatan dini tanah longsor merupakan salah satu sarana dan prasarana dalam kebencanaan yang penting adanya, karena berfungsi sebagai alat pendeteksi dan peringatan dini yang berfungsi memberikan peringatan sedini mungkin dalam memberikan informasi akan terjadinya bencana. Penting adanya karena adanya alat ini bisa mengantisipasi jatuhnya korban jiwa dan memberikan rasa aman untuk masyarakat daerah rawan bencana. Di Kota Semarang sendiri EWS untuk bencana tanah longsor hanya ada 2 yaitu di Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan dan Kelurahan Sukorejo Kecamatan Gunungpati, sedangkan daerah rawan bencana tanah longsor di Kota Semarang mencakup 37 Kelurahan dari 9 Kecamatan.

Masalah sarana dan prasarana kebencanaan yang belum memadai perlu diperhatikan karena akan berkaitan dengan aktivitas dan mobilitas kerja BPBD Kota Semarang. Belum adanya sarana dan prasarana yang memadai, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana tanah longsor belum optimal dilakukan. Selain itu BPBD Kota Semarang kekurangan sumber daya berkompeten dibidangnya. Hal ini dikarenakan BPBD memberikan pelayanan 24 jam non stop kepada masyarakat dan pegawai yang jaga ada 7 orang setiap shift. Kurangnya SDM berkompeten akan berpengaruh terhadap kinerja yang diberikan oleh BPBD Kota Semarang kepada masyarakat.

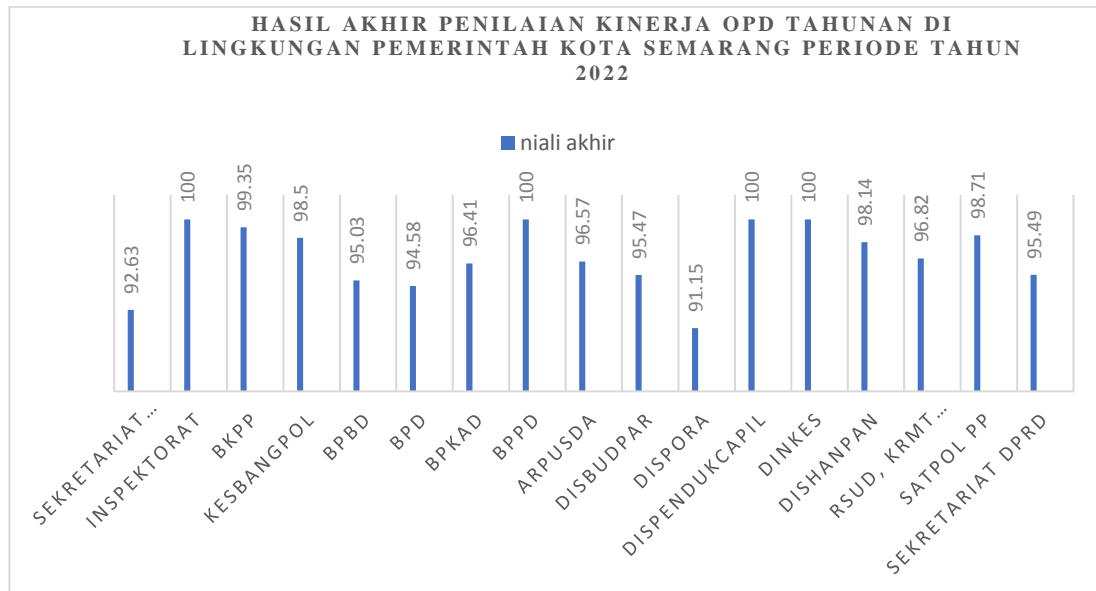
Responsivitas atau daya tanggap merupakan kemampuan dari organisasi untuk merespon atau menanggapi berbagai macam kebutuhan pengguna jasa dalam waktu yang cepat, dan tepat sesuai dengan jenis kebutuhan masyarakat. Lokasi kantor BPBD Kota Semarang yang tidak berada ditengah Kota dan berada di daerah Penggaron yang berada di bagian timur Kota Semarang, sedangkan hampir semua daerah rawan tanah longsor berada di Kota Semarang bagian selatan dan barat. Hal tersebut cukup menghambat BPBD Kota Semarang untuk segera merespon dan sampai pada lokasi bencana tanah longsor yang diduga merupakan bagian dari daerah rawan tanah longsor yang berada di Kota Semarang bagian selatan dan barat.

Akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan tugas pokok dan fungsi serta misi dari organisasi serta bagaimana transparansi publik mengenai program dan kegiatan yang dilakukan BPBD Kota Semarang. Akuntabilitas organisasi pemerintah dapat berbentuk laporan pertanggungjawaban organisasi seperti LKjIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang merupakan laporan kinerja organisasi dalam satu tahun terakhir, dan harus dipublikasikan atau diupload di website resmi yang merupakan bagian dari tranparansi publik. Transparansi LKjIP yang sudah diupload di website resmi BPBD Kota Semarang hanya ada sampai tahun 2021, dan LKjIP tahun 2022 belum ada, padahal ini sudah pertengahan tahun 2023 yang seharusnya laporan LKjIP tahun 2022 sudah jadi dan sudah diupload di website resmi BPBD Kota Semarang, namun sampai saat ini belum ada dan belum sudah diupload di website resmi BPBD Kota Semarang.

Hal-hal yang sudah disampaikan sebelumnya menjadi indikasi awal bahwa kinerja BPBD dalam menanggulangi tanah longsor belum maksimal dilakukan karena masih terdapat kendala dalam mencapai kinerja yang baik dan masih tingginya bencana tanah longsor di awal tahun 2023 ini yaitu sudah mencapai 81 kejadian. Hal tersebut diperkuat dengan adanya hasil akhir penilaian kinerja organisasi perangkat daerah tahunan di lingkungan pemerintah Kota Semarang tahun 2022, dengan nilai akhir belum mencapai 100. Dibawah ini akan disajikan data hasil akhir penilaian kinerja organisasi perangkat daerah tahunan di lingkungan pemerintah Kota Semarang tahun 2022, yaitu sebagai berikut:

Gambar 1.3

Diagram Hasil Akhir Penilaian Kinerja OPD Tahunan di Lingkungan Pemerintahan Kota Semarang Periode Tahun 2022.



Sumber: Website Resmi BPBD Kota Semarang

Dilihat dari gambar 1.3 tentang hasil akhir penilaian kinerja organisasi perangkat daerah tahunan di lingkungan pemerintahan Kota Semarang periode tahun 2022. BPBD Kota Semarang mendapatkan nilai akhir sebesar 95,03 yang menempati nilai terendah ke empat diantara 17 OPD lainnya. Nilai akhir terendah yaitu oleh DISPORA dengan nilai 91,15. Kemudian disusul oleh SEKRETARIAT dengan nilai akhir sebesar 92,63 dan terendah urutan ketiga ditempati oleh BPD dengan nilai akhir sebesar 94,58 dan setelah itu BPBD. Nilai akhir diatas 90 termasuk dalam kategori BAIK namun membuktikan bahwa kinerja belum optimal disemua bagian.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat digali informasi yang berkaitan dengan bagaimana kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana tanah longsor di Kota Semarang, dan faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat kinerja BPBD Kota Semarang. Oleh karena itu, judul yang diambil sebagai judul dalam penelitian ini, penulis mengambil judul **“Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor Di Kota Semarang”**.

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

- 1) Banyaknya kejadian bencana tanah longsor di Kota Semarang.
- 2) Masih kurangnya sistem peringatan dini bencana.
- 3) Sarana dan prasarana kebencanaan belum lengkap
- 4) Belum adanya dokumen kontijensi bencana tanah longsor.
- 5) Capaian kinerja yang belum optimal
- 6) Terdapat faktor penghambat yang menyebabkan kinerja BPBD belum maksimal dalam penanggulangan bencana tanah longsor.

1.2.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan hal yang digunakan penulis untuk membatasi pola pikir agar permasalahan yang dibahas lebih difokuskan. Oleh karena itu perlu dilakukan perumusan masalah guna menentukan faktor dari penelitian yang ingin dikaji. Berdasarkan uraian masalah pada latar belakang, dirumuskan rumusan masalah pada penelitian ini terkait dengan pertanyaan tentang:

- 1) Bagaimana Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana tanah longsor di Kota Semarang?
- 2) Faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana tanah longsor di Kota Semarang?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini pada prinsipnya adalah untuk pengetahuan yang berguna dan untuk menjawab permasalahan berdasarkan rumusan masalah tersebut. Dengan demikian berdasar penelitian ini dapat diketahui atau memiliki tujuan penelitian ini yaitu:

- 1) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana tanah longsor di Kota Semarang
- 2) Untuk mengetahui faktor apa yang menjadi pendorong dan penghambat dalam Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana tanah longsor di Kota Semarang

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik secara teoretis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

- 1) Menambah wawasan untuk penulis dan pembaca penelitian ini
- 2) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai penelitian tentang analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana tanah longsor di Kota Semarang, khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- 3) Diharapkan dapat sebagai bahan acuan atau referensi terhadap penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan variabel penelitian.

1.4.2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan peneliti dan digunakan sebagai sarana penyampaian ilmu-ilmu yang telah didapatkan selama berada dibangku perkuliahan.

2) Bagi BPBD Kota Semarang

Sebagai bahan masukan serta pertimbangan dalam pelaksanaan kinerja yang lebih baik dan diharapkan bisa menjadi sumbangan alternatif penyelesaian masalah yang ada.

1.5.Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1.Administrasi Publik

Menurut Leonard D. White (1955) dalam Inu Kencana Syafii (2010), Administrasi adalah suatu proses yang umum ada pada setiap usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil. Kemudian menurut pendapat A. Dunsire yang dikutip oleh Donovan dan Jackson (1991: 9) dalam Keban (2008) A.Dunsire mengartikan administrasi sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarahan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritik. Selanjutnya yaitu menurut Siagian (1994: 3) memberikan pengertian bahwa administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dua orang atau lebih, yang terlibat dalam bentuk usaha kerja sama demi tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya (Anggara, 2012). Kemudian menurut Taylor yang dimaksudkan dengan administrasi adalah dorongan untuk mencapai sasaran menggunakan organisasi dan manajemen sebagai landasannya (Sugandi, 2011).

Kata "Publik" berasal dari bahasa Inggris yaitu "*public*" di Indonesia identik dengan masyarakat. Kata masyarakat ini dalam pengertian umum menyatakan semua kalangan umum yang ditujukan pada keseluruhan rakyat (Sugandi, 2011). Selanjutnya pengertian Publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir,

perasaan harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki (Syafiie, 2010) .

Beberapa definisi dari administrasi publik seperti Marshall E. Dimock, Gladys O. Dimock dan Louis W Koenig (1960) dalam Inu Kencana dkk (1998) yang menyiratkan bahwa administrasi publik adalah kegiatan pemerintahan di dalam melaksanakan politiknya. Prajudi Atmosudiro (1982) menerangkan juga bahwa administrasi publik adalah administrasi dari negara sebagai organisasi dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan. Kemudian selanjutnya yaitu menurut Edward H. Litchfield, administrasi publik adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintahan diorganisasikan, diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin (Syafiie, 2010). Menurut Dwight Waldo administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah (Syafiie, 2010).

Menurut Nicholas Henry ada 6 paradigma dalam administrasi publik, yaitu:

1. Dikotomi politik dan administrasi (1900-1927), tokoh-tokoh dari paradigma ini adalah Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Frank J. Goodnow dalam tulisannya yang berjudul “*Politic and Administration*” (1900) mengungkapkan bahwa pemerintah mempunyai 2 fungsi yang berbeda , yaitu:
 - a. Fungsi politik yaitu harus memusatkan perhatiaannya pada pembuat kebijakan/ekspresi pada kehendak rakyat.
 - b. Fungsi administrasi yaitu pada pelaksanaan/implementasi dari kebijakan/kehendak tersebut badan yudikatif membantu badan legislatif dalam menentukan tujuan dan merumuskan kebijakan sedangkan badan eksekutif secara terpisah dan apolitis melaksanakan kebijakan tersebut. Implikasi dari paradigma tersebut adalah bahwa administrasi harus dilihat sebagai suatu yang bebas dinilai dan diarahkan untuk mencapai nilai efisien dan nilai ekonomis dari *government* birokrasi. Sayangnya dalam paradigma ini hanya ditekankan aspek locus saja yaitu birokrasi pemerintah atau *government* birokrasi, tetapi fokus atau metode apa yang

harus dikembangkan dalam administrasi publik kurang dibahas secara jelas dan terperinci

2. Prinsip-prinsip administrasi (1927-1937), tokoh-tokoh dari paradigma ini adalah Willoughby, L. Gullick dan L. Urwick, serta Fayol dan Taylor. Fayol dan Taylor memperkenalkan prinsip-prinsip administrasi sebagai fungsi atau fokus administrasi publik. Prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam POSDCORB yaitu *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Staffing* (pengadaan tenaga kerja), *Directing* (pemberian bimbingan), *Coordinating* (pengkoordinasian), *Reporting* (pelaporan), dan *Budgeting* (penganggaran). Fleksibel yaitu bisa diterapkan dimana saja atau bersifat universal, sedangkan lokus dari administrasi publik tidak pernah diungkapkan secara jelas karena mereka beranggapan bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat berlaku dimana saja termasuk di organisasi pemerintah, dengan demikian dalam paradigma administrasi ini fokus lebih ditekankan dari pada lokusnya.
3. Administrasi negara/publik sebagai ilmu politik (1950-1970), dengan tokohnya yaitu Morstein – Marx. Seorang editor buku yang berjudul “*Elements of Public Administration*” (1946) mempertanyakan pemisahan politik dan administrasi sebagai suatu yang tidak mungkin atau tidak realistis. Sementara Herbert Simon mengarahkan kritiknya terhadap ketidak konsistennya prinsip administrasi dan menilai bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak berlaku universal. Dalam konteks ini administrasi negara bukannya bebas nilai/dapat berlaku dimana saja, tetapi justru selalu dipengaruhi nilai-nilai tertentu. Disini terjadi pertentangan antara anggapan mengenai administrasi yang bebas nilai pada satu pihak dengan anggapan akan nilai-nilai yang bermuatan politik dilain pihak. Dalam praktek ternyata anggapan kedua yang berlaku, karena itu John G secara tegas mengatakan bahwa teori administrasi publik sebenarnya juga teori politik (disini John G melihat bahwa administrasi publik sudah tidak bebas nilai). Akibatnya muncul paradigma baru yang menganggap administrasi publik sebagai ilmu politik dimana lokusnya adalah birokrasi pemerintahan sedangkan fokusnya menjadi kabur, karena prinsip-prinsip administrasi publik mengandung banyak kelemahan, sayangnya mereka yang mengajukan kritikan terhadap ilmu-ilmu administrasi

tidak memberi jalan keluar tentang fokus yang dapat digunakan dalam administrasi publik. Perlu diketahui bahwa pada masa tersebut administrasi publik mengalami krisis identitas karena ilmu politik dianggap disiplin yang sangat dominan dalam dunia administrasi publik.

4. Administrasi publik sebagai ilmu administrasi (1956-1970)

Dalam paradigma ini prinsip-prinsip manajemen yang pernah populer sebelumnya dikembangkan secara ilmiah dan mendalam. Perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan metodologi modern seperti metode-metode kuantitatif, analisa sistem, riset operasi, dst. Merupakan fokus dari paradigma itu. Ada 2 arah perkembangan yang terjadi dalam paradigma ini:

- a. Berorientasi pada perkembangan ilmu administrasi murni yang didukung oleh disiplin psikologi sosial.
- b. Berorientasi pada kebijakan publik. Semua fokus yang dikembangkan disini diasumsikan dapat diterapkan tidak hanya dalam dunia bisnis tetapi juga dalam dunia administrasi publik, maka lokus jadi tidak jelas.

5. Administrasi publik sebagai administrasi publik (1970 an- sekarang)

Paradigma ini telah memiliki fokus dan lokus yang jelas. Fokus administrasi publik dan paradigma ini adalah teori organisasi, teori manajemen dan kebijakan publik. Lokusnya adalah masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan publik, urusan hukum, urusan publik dan kebijakan publik.

Dalam teori organisasi terdapat beberapa pertanyaan:

- a. Bagaimana dan mengapa organisasi bekerja
- b. Bagaimana dan mengapa organisasi bertindak
- c. Bagaimana dan mengapa keputusan dibuat.

1.5.2. Manajemen Publik

Beberapa definisi manajemen menurut ahli yang pertama yaitu menurut Stoner & Wankel (1996:4), Manajemen secara harfiah adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Manajemen adalah rangkaian tindakan yang ditujukan untuk

mencapai suatu kerja sama yang rasional dalam sistem administrasi (Anggara, 2016). Selanjutnya yaitu menurut Ordway Tead (1951) manajemen adalah proses dan perangkat yang mengarahkan serta membimbing kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian menurut Shafritz dan Russel (1997: 20) manajemen berkenaan dengan orang yang bertanggungjawab menjalankan suatu organisasi, dan proses menjalankan organisasi itu sendiri yaitu pemanfaatan sumber daya (seperti orang dan mesin) untuk mencapai tujuan organisasi. Definisi ini tidak hanya menunjukkan proses pencapaian tujuan tetapi juga sekelompok orang yang bertanggungjawab menjalankan proses tersebut (Keban, 2008).

Kata "Publik" berasal dari bahasa Inggris yaitu "*public*" di Indonesia identik dengan masyarakat. Kata masyarakat ini dalam pengertian umum menyatakan semua kalangan umum yang ditujukan pada keseluruhan rakyat (Sugandi, 2011). Selanjutnya pengertian Publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki (Syafie, 2010). Kemudian terdapat juga pengertian publik dari sumber lain. Publik adalah "kumpulan" orang yang memiliki minat dan kepentingan yang (*interest*) sama terhadap suatu isu atau masalah yaitu dalam Mukarom dkk, (2015).

Overman dalam Keban (2004:85), mengemukakan bahwa manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing*, dan *controlling* satu sisi, dengan SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik disisi lain. Selanjutnya yaitu menurut Rainey (1990) berpendapat, bahwa manajemen publik memiliki asal-usul semantik yang menyiratkan mengambil hal-hal ditangan dan ini menunjukkan semacam suatu ketegasan dan efisiensi yang dikaitkan dalam stereotip untuk manajemen bisnis (Sugandi, 2011).

Menurut Allison (dalam Mahmudi, 2015:39) mengidentifikasi tiga fungsi manajemen yang secara umum berlaku di sektor publik, yaitu

1. Fungsi strategi, meliputi:
 - a. Penetapan tujuan dan prioritas organisasi

- b. Membuat rencana operasional untuk mencapai tujuan
- 2. Fungsi manajemen komponen internal, meliputi:
 - a. Pengorganisasian dan penyusunan staf.
 - b. Pengarahan dan manajemen sumber daya manusia.
 - c. Pengendalian kinerja.
- 3. Fungsi manajemen konstituen eksternal, meliputi:
 - a. Hubungan dengan unit eksternal organisasi.
 - b. Hubungan dengan organisasi lain.
 - c. Hubungan dengan pers dan publik.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli mengenai manajemen publik, dapat disimpulkan bahwa manajemen publik merupakan sebuah tindakan pemerintah yang didalamnya terdapat beberapa fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan dan melayani publik atau masyarakat secara prima dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1.5.3.Konsep Kinerja

1.5.3.1.Kinerja

Kinerja (*Performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi (Mohamad, 2006). Kinerja dapat dipandang sebagai proses maupun hasil pekerjaan. Kinerja merupakan suatu proses tentang bagaimana pekerjaan berlangsung untuk mencapai hasil kerja. Namun, hasil pekerjaan itu sendiri juga menunjukkan kinerja (Wibowo, 2017).

Kinerja menurut Darmanto (2015: 77) adalah sebuah kata dalam Bahasa Indonesia yaitu dari kata dasar “kerja” yang mengadopsi dari Bahasa asing yaitu prestasi, dapat pula berarti hasil kerja. Kinerja bisa juga dapat dikatakan sebagai sebuah hasil (*output*) dari suatu proses tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen

organisasi terhadap sumber-sumber tertentu yang menggunakan (*input*). Selanjutnya, kinerja juga merupakan hasil dari serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu organisasi.

Kinerja menurut Fahmi (2013:2) adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut *profit oriented* dan *non profit oriented* yang dihasilkan selama satu periode waktu.

Kinerja menurut Mahsun (2016:25) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.

Terkait dari konsep kinerja tersebut, Rummler dan Brache dalam (Sudarmanto, 2009:7-8) mengatakan ada tiga jenis kinerja, yaitu:

1. Kinerja organisasi.

Merupakan pencapaian hasil pada level atau unit analisis organisasi. Kinerja pada level organisasi ini terkait dengan tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi.

2. Kinerja proses

Merupakan kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Kinerja pada level proses ini dipengaruhi oleh tujuan proses, rancangan proses dan manajemen proses.

3. Kinerja individu/pekerjaan

Merupakan pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Kinerja pada level ini dipengaruhi oleh tujuan pekerjaan dan manajemen pekerjaan serta karakteristik individu.

Kinerja menurut Sinambela (2017: 137) adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau sekelompok pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan

organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Dijelaskan bahwa kinerja adalah tingkat keberhasilan seseorang atau lembaga dalam melaksanakan pekerjaannya.

Berdasarkan beberapa pengertian kinerja diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah adalah hasil kerja secara kuantitas dan kualitas yang dapat dicapai oleh seseorang, suatu organisasi serta suatu kegiatan atau program dalam mencapai tugas dan fungsi sesuai tujuan yang sudah ditetapkan.

1.5.3.2.Kinerja Organisasi

Kinerja Organisasi merupakan serangkaian aktivitas yang dijalankan oleh organisasi yang dapat berupa pengelolaan sumber daya organisasi maupun proses pelaksanaan kerja yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Bryson (dalam Sembiring, 2012:82) mengatakan bahwa kinerja organisasi merupakan hasil dari kegiatan kerjasama diantara para anggota dan komponen organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Pendapat lainnya dari Wibawa dan Atmosudirjo (dalam Pasolong, 2011:176) mengemukakan bahwa kinerja organisasi sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk meningkatkan kebutuhannya secara efektif.

Menurut M Mahsun (2006:20) kinerja organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program atau kebijakan, dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis suatu organisasi.

Menurut Amitai Etzioni (Keban, 2008:227) kinerja organisasi menggambarkan seberapa jauh suatu organisasi merealisasikan tujuan akhirnya. Sedangkan menurut Bastian (Tangkilisan, 2005:175) kinerja organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi, dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi tersebut.

Jadi kinerja organisasi adalah kemampuan organisasi untuk melaksanakan setiap tugas – tugas yang diberikan kepada organisasi untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasai yang telah ditentukan. Kinerja organisasi tidak hanya berfokus pada pencapaian hasil atau tujuan, tetapi juga menekankan pada proses pelaksanaan dan sumber daya guna mencapai tujuannya.

1.5.3.3.Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jas; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan (Robertson dalam Mohamad, 2006).

Sementara menurut Lohman (dalam Mohamad, 2006) pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi. Whittaker (dalam Mohamad, 2006) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Simons (dalam Mohamad, 2006) menyebutkan bahwa pengukuran kinerja membantu manajer dalam memonitor implementasi strategi bisnis dengan cara membandingkan antara hasil aktual dengan sasaran dan tujuan strategi. Jadi pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum. Oleh karena sifat dan karakteristik yang unik, maka organisasi sektor publik memerlukan ukuran

penilaian kinerja yang lebih luas, tidak hanya tingkat laba, tidak hanya efisiensi dan juga tidak hanya ukuran finansial.

Ada berbagai macam dimensi dalam pengukuran kinerja organisasi yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya John Miner (Sudarmanto, 2009:11-12) yang mengemukakan adanya empat dimensi yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur atau indikator dalam menilai kinerja organisasi, yaitu :

- Kualitas, yaitu : tingkat kesalahan, kerusakan, kecermatan.
- Kuantitas, yaitu : jumlah pekerjaan yang dihasilkan.
- Penggunaan waktu dalam bekerja, yaitu : tingkat ketidakhadiran, keterlambatan, waktu kerja efektif/jam kerja hilang.
- Kerjasama dengan orang lain dalam bekerja.

Kinerja organisasi dapat dilihat melalui beberapa ukuran - ukuran tertentu yang dapat dijadikan patokan untuk menilai besarnya capaian kinerja yang berhasil dipenuhi oleh sebuah organisasi. Ukuran atau indikator tersebut salah satunya dikemukakan oleh Agus Dwiyanto (2008:50) dalam (Sudarmanto, 2014 : 12-19) yang mengemukakan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik, yaitu:

1. Produktivitas

Produktivitas secara umum merupakan kemampuan dalam memperoleh hasil (*output*) yang optimal melalui penggunaan sumber daya (*input*) yang ada di dalam organisasi secara efektif dan efisien. Secara lebih sederhana menurut L. Greenberg (dalam Sinungan, 2008:15) menyatakan bahwa produktivitas sebagai perbandingan antara totalitas pengeluaran (*output*) dibandingkan totalitas masukan (*input*) selama kurun waktu tertentu. Konsep produktivitas mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas pelayanan. Dalam hal ini konsep ukuran produktivitas yaitu dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik dapat memberikan hasil yang diharapkan.

2. Kualitas Layanan

Kualitas layanan berkaitan dengan bagaimana kepuasan pengguna jasa atau masyarakat terhadap kinerja yang diberikan oleh organisasi. Kepuasan masyarakat menjadi sumber utama dalam menilai kualitas pelayanan karena banyak pandangan negatif yang terbentuk dari organisasi publik disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang diharapkan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Lewis & Booms (dalam Tjiptono & Chandra, 2011:180) bahwa kualitas layanan merupakan ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu terwujud sesuai dengan harapan pelanggan atau masyarakat.

3. Responsivitas

Responsivitas merupakan kemampuan dari organisasi untuk merespon atau menanggapi berbagai macam kebutuhan pengguna jasa dalam waktu yang cepat, dan tepat sesuai dengan jenis kebutuhan yang diinginkan. Menurut Agus Dwiyanto (2006:62) responsivitas merupakan kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program - program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

4. Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit (Lenvine, 1990). Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Artinya responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas menunjukkan seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik konsisten dengan kehendak masyarakat. Hal ini menandakan bahwa suatu organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi jika suatu kegiatan yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Pendapat lain

yang sedikit berbeda dinyatakan oleh Adisasmita (2011:30) menurutnya akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan tugas pokok dan fungsi serta misi dari organisasi. Menurut Hopwood dan Tomkins (dalam Mahmudi, 2013:9) mengemukakan bahwa terdapat dimensi akuntabilitas publik yang harus dilakukan, antara lain:

Menurut Kuncorotomo (dalam Pasolong, 2011:180) mengemukakan beberapa indikator kinerja yang dijadikan pedoman untuk menilai kinerja organisasi publik antara lain:

1. Efisiensi

Menyangkut pertimbangan keberhasilan organisasi dalam pelayanan publik, mendapat laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomi.

2. Efektivitas

Tujuan suatu organisasi tercapai atau tidaknya dilihat dari rasionalitas teknik, nilai misi, tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan.

3. Keadilan

Indikator ini mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik.

4. Daya Tanggap

Organisasi publik merupakan bagian dari daya tanggap negara atau pemerintah akan kebutuhan masyarakat.

Tabel 1.4

Tabel Indikator kinerja menurut beberapa ahli

Indikator kinerja menurut beberapa ahli yang dirangkum dalam tabel dibawah ini, yaitu sebagai berikut:

No.	Dwiyanto	Kuncorotomo	John Miner
1.	Produktivitas	Efisiensi	Kualitas
2.	Kualitas Pelayanan	Efektivitas	Kuantitas
3.	Responsivitas	Daya Tanggap	Penggunaan Waktu
4.	Responsibilitas	Keadilan	Kerjasama
5.	Akuntabilitas		

Sumber: Diolah penulis dari beberapa sumber

Berdasarkan beberapa pendapat ahli mengenai kinerja organisasi dapat disimpulkan bahwa kinerja organisasi merupakan serangkaian usaha yang dilaksanakan secara bersama-sama diantara anggota organisasi untuk mencapai suatu hasil kerja yang dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari lingkungan internal maupun eksternal organisasi yang berkaitan dengan pencapaian visi, misi, dan tujuan dari suatu organisasi. Berdasarkan beberapa pendapat ahli mengenai kinerja organisasi, maka penelitian ini akan menggunakan teori kinerja organisasi menurut Agus Dwiyanto. Berdasarkan indikator-indikator yang dikemukakan oleh Dwiyanto, peneliti memutuskan memilih indikator produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas karena dianggap lebih tepat untuk mengukur kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang. Tiga indikator tersebut dipilih karena sering muncul dan digunakan pada penelitian-penelitian sebelumnya mengenai kinerja organisasi publik.

1.5.3.4.Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi

Kinerja organisasi merupakan sebuah gambaran tentang pencapaian hasil yang telah dicapai di suatu organisasi dalam melaksanakan tugas guna mewujudkan tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu yang dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Menurut Soesilo (dalam Tangkilisan, 2005:180), kinerja organisasi dipengaruhi adanya faktor-faktor berikut :

1. Struktur organisasi sebagai hubungan internal yang berkaitan dengan fungsi yang menjalankan aktivitas organisasi.
2. Kebijakan pengelolaan, berupa visi dan misi organisasi.
3. Sumberdaya manusia berhubungan dengan kualitas karyawan untuk bekerja dan berkarya secara optimal.
4. Sistem informasi manajemen berhubungan dengan pengelolaan database untuk digunakan dalam mempertinggi kinerja organisasi.
5. Sarana dan prasarana yang dimiliki, berhubungan dengan penggunaan teknologi bagi penyelenggara organisasi pada setiap aktivitas organisasi

Menurut Ruky dalam Tangkilisan (2005: 180), mengidentifikasi faktor – faktor yang mempunyai pengaruh langsung terhadap tingkat pencapaian kinerja organisasi, yaitu:

1. Teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi.
2. Kualitas input atau material yang digunakan oleh organisasi.
 - a. Kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan ruangan dan kebersihan.
 - b. Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada dalam organisasi.
 - c. Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan standart dan tujuan organisasi.
3. Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensasi, imbalan dan promosi.

Kinerja merupakan suatu konstruk multidimensional yang mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya. Menurut Mahmudi (2015:20) dalam bukunya yang berjudul Manajemen Kinerja Sektor Publik, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah:

- a. Faktor personal/individual, adalah sesuatu atau aspek yang melekat pada diri seseorang individu yang mempengaruhi perilakunya, meliputi: pengetahuan, keterampilan (skill), kemampuan, kepercayaan diri, motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu.
- b. Faktor kepemimpinan, adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain atau bawahannya dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer dan team leader.
- c. Faktor tim, adalah sekumpulan orang yang memiliki ketrampilan yang saling melengkapi dan memiliki komitmen untuk mecapai suatu tujuan bersama dengan suatu proses kerja bersama dimana mereka saling bertanggung jawab

- satu sama lain, meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim.
- d. Faktor sistem, adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksud untuk mencapai suatu tujuan, meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja dalam organisasi.
 - e. Faktor kontekstual (situasional) adalah faktor yang berasal dari lingkungan internal atau eksternal seseorang, seperti lingkungan keluarga dan tekanan kerja, atau dengan kata lain faktor kontekstual (situasional) meliputi: tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal seseorang.

Tabel 1.5

Tabel Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Menurut Beberapa Ahli

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menurut beberapa ahli dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

No.	Soesilo	Ruky	Mahmudi
1.	Struktur Organisasi	Teknologi	Personal/individual
2.	Kebijakan Pengelola	Kualitas Input:	Kepemimpinan
3.	Sumber Daya Manusia	- Kualitas Lingkungan Fisik - Budaya Organisasi - Kepemimpinan	Tim
4.	Sistem Informasi Manajemen	Pengelolaan SDM	Sistem
5.	Sarana dan Prasarana		Kontekstual (situasional)

Sumber: Diolah penulis dari beberapa sumber

Kinerja organisasi dipengaruhi oleh berbagai macam faktor pendukung maupun penghambat, baik dari internal organisasi maupun eksternal organisasi. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi dalam proses mencapai tujuan organisasi, yang bisa jadi menjadi penghambat atau pendorong pencapaian tujuan organisasi serta secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan faktor-faktor kinerja organisasi menurut Mahmudi, yaitu faktor personal, faktor tim, faktor kepemimpinan, faktor sistem dan faktor kontekstual (situasional). Peneliti memutuskan menggunakan faktor personal,

faktor tim, faktor kepemimpinan, dan faktor sistem dalam penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana tanah longsor di Kota Semarang.

1.5.4.Konsep Bencana

1.5.4.1.Bencana

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dalam pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Menurut *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam (Sugiantoro, 2010). Bencana sering diidentikkan dengan suatu yang buruk. Istilah bencana mengacu pada suatu kejadian yang dikaitkan dengan efek kerusakan hebat yang ditimbulkan. Peristiwa atau kejadian berbahaya pada suatu daerah yang mengakibatkan kerugian dan penderitaan manusia, serta kerugian material yang hebat.

Carter (2001) yang dikutip oleh Kodoatie dan Sjarief (2006) dalam (Sugiantoro, 2010) mendefinisikan bencana sebagai suatu kejadian alam atau buatan manusia, datangnya tiba-tiba atau progresive, yang menimbulkan dampak yang dahsyat (hebat) sehingga komunitas (masyarakat) yang terkena atau terpengaruh harus merespon dengan tindakan-tindakan luar biasa.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana diklasifikasikan atas 3 jenis sebagai berikut:

1. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa

bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

2. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
3. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Potensi penyebab bencana diwilayah Indonesia dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

1. Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/ lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.
2. Bencana nonalam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
3. Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Adanya suatu bencana pasti akan memberikan efek atau dampak terhadap masyarakat atau lingkungan. Bencana alam dapat mengakibatkan dampak yang merusak pada bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kerusakan infrastruktur dapat mengganggu aktivitas sosial, korban jiwa, kerusakan ekosistem, dan hilangnya tempat tinggal. Dampak bencana merupakan akibat yang ditimbulkan dari suatu kejadian bencana yang dapat berupa hilangnya nyawa manusia, luka-luka, mengungsi, kerusakan infrastruktur atau aset, kerusakan lingkungan ekosistem, kerugian harta benda, dan gangguan stabilitas sosial-ekonomi. Besar atau kecilnya dampak bencana yang ditimbulkan akan tergantung pada tingkat ancaman (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), serta kemampuan masyarakat dalam menanggulangi bencana.

Menurut Benson dan Clay dalam Nurjanah, dkk. (2011), dampak bencana dibagi menjadi tiga bagian antara lain:

1. Dampak langsung (*direct impact*), yaitu terdiri dari kerugian finansial akibat kerusakan aset ekonomi, contohnya rusaknya bangunan seperti tempat tinggal maupun tempat usaha.
2. Dampak tidak langsung (*indirect impact*) yaitu terhentinya dalam proses produksi, hilangnya sumber penerimaan atau biasa disebut dengan *flow value*.
3. Dampak sekunder (*secondary impact*) contohnya pertumbuhan ekonomi yang terhambat, terganggunya rencana pembangunan, banyaknya pengangguran serta meningkatnya angka kemiskinan dan lain sebagainya.

Selain dampak yang dikemukakan diatas, ada pun dampak psikologis yang diakibatkan adanya kejadian bencana. Dampak psikologis ini dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan kondisi psikologis seseorang.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bencana merupakan peristiwa atau kejadian yang ditimbulkan oleh alam maupun non alam dan atau ulah manusia yang menyebabkan kerugian secara material dan non material.

1.5.4.2. Bencana Tanah Longsor

Tanah longsor adalah gerakan masa tanah dalam jumlah besar yang bergerak pada bidang geser tertentu, di mana pada bidang tersebut tahanan tanah dalam menahan geseran terlampaui. Menurut Robert J. Kodoatie dan Roestam Sjarief (2006:193) longsor terjadi karena ketidakseimbangan gaya - gaya yang bekerja pada lereng atau gaya dorong di daerah lereng lebih besar dari gaya tahan yang ada di lereng tersebut.

Tanah longsor atau gerakan tanah adalah suatu konsekuensi fenomena dinamis alam untuk mencapai kondisi baru akibat gangguan keseimbangan lereng yang terjadi, baik secara alamiah maupun akibat ulah manusia. Tanah longsor akan terjadi pada suatu lereng jika ada keadaan ketidakseimbangan yang menyebabkan terjadinya suatu proses mekanis, mengakibatkan sebagian dari lereng tersebut bergerak mengikuti gaya

gravitasi, dan selanjutnya setelah terjadi tanah longsor, lereng akan seimbang atau stabil kembali (Akhirianto dan Naryanto, 2016: 117) dalam Isnaini (2019).

Penyebab tanah longsor adalah kondisi curah hujan yang tinggi, topografi lereng yang curam, kondisi tanah yang rawan erosi, penggunaan lahan menjadi penting diperhatikan untuk mencegah dan mengatasi bencana longsor di masa mendatang, dalam Isnaini (2019).

Terdapat karakteristik bencana tanah longsor menurut Robert J. Kodoatie dan Roestam Sjarief (2006:193) antara lain:

- Periode peringatan bencana tidak pasti, kadang tidak ada peringatan sama sekali. Secara umum peringatan bencana tanah longsor apabila terjadi hujan terus menerus.
- Kecepatan kejadian bisa sangat cepat atau instan.
- Kerusakan infrastruktur bisa sangat besar.
- Apabila terjadi di dekat sungai menyebabkan aliran sungai terhalang, bisa terjadi banjir.
- Kadang daerah produktif bisa hilang sama sekali (longsornya tanah dari bukit).
- Longsor tidak harus terjadi pada lereng perbukitan, walaupun kemiringan lereng berpengaruh terhadap kejadian longsor. Longsor bisa juga terjadi pada daerah datar, hal ini tergantung stuktur dalam tanah.

Ada beberapa jenis longsor menurut Dikau (dalam Kodatie, 2006:196) antara

- Jatuh/runtuh (*fall*)
- Tumbang (*topple.*)
- Gelincir (*slide*)
 - a. Gelincir berputar (*slide rotational*)
 - b. Gelincir bergeser (*slide translational*)
 - c. Gelincir blok (*block slide*)
 - d. Gelincir lempeng (*slab slide*)
 - e. Gelincir batuan (*Rock slide*)
 - f. Gelincir debris (*debris slide*)
 - g. Gelincir lumpur (*mudslide*)

- Penyebaran (*spreading*)
 - a. Penyebaran ke samping (*lateral spreading*)
 - b. Penyebaran batuan (*rock spreading*)
 - c. Penyebaran tanah (*soil spreading*)
- Aliran (*flow*)
 - a. Aliran batuan (*rock flow*)
 - b. Aliran lahar (*debris flow*)
 - c. Aliran tanah/lumpur (*mudflow*)
- Kompleks atau gabungan

1.5.4.3. Penanggulangan Bencana

Menurut Agus Rahmat (2006:12) dalam Prasetyo (2018), penanggulangan bencana merupakan seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana pada sebelum, saat terjadi dan sesudah terjadi bencana yang dikenal sebagai siklus manajemen bencana.

Secara teknis dikemukakan oleh Carter (dalam Kodoatie, 2006:69), menyatakan bahwa tindakan penanggulangan atau pengelolaan bencana didefinisikan sebagai suatu ilmu terpadu (aplikatif) yang mencari dengan observasi sistematis dan analisis bencana untuk meningkatkan tindakan-tindakan (*measure*) terkait dengan preventif (pencegahan), mitigasi (pengurangan), persiapan, respon darurat dan pemulihan.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana berdasarkan pasal 3 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, yaitu sebagai berikut:

1. Cepat dan tepat adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

2. Prioritas adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.
3. Koordinasi dan keterpaduan. Koordinasi adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung. Sedangkan keterpaduan adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.
4. Berdaya guna dan berhasil guna. Berdaya guna adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan. Sedangkan berhasil guna adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.
5. Transparansi dan akuntabilitas. Transparansi adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan akuntabilitas adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.
6. Kemitraan. Penanggulangan bencana harus melibatkan berbagai pihak secara seimbang
7. Pemberdayaan. Penanggulangan bencana dilakukan dengan melibatkan korban bencana secara aktif.
8. Nondiskriminasi adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.
9. Nonproletisi adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Gambar 1.4.

Siklus Penanggulangan Bencana

SIKLUS PENANGGULANGAN BENCANA



Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana

1.5.4.4. Tahapan Manajemen Bencana

Manajemen bencana merupakan suatu proses terencana yang dilakukan untuk mengelola bencana dengan baik dan aman. Siklus manajemen bencana meliputi 3 tahapan atau fase manajemen bencana yaitu:

1. Pra Bencana

Tahapan pra bencana ini merupakan tahapan manajemen bencana pada kondisi sebelum kejadian atau pra bencana mencakup kegiatan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini.

a. Pencegahan (*Prevention*)

Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana jika mungkin dengan meniadakan bahaya. Contoh kegiatan pencegahan diantaranya melarang pembakaran hutan dalam perladangan, melarang penambangan batu

di daerah curam, melarang membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya.

b. Mitigasi Bencana (*Mitigation*)

Mitigasi adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik, maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Kegiatan mitigasi inidapat dilakukan melalui pelaksanaan penataan ruangan; pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

c. Kesiapsiagaan (*Preparedness*)

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

d. Peringatan Dini (*Early Warning*)

Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin pada masyarakat mengenai kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang atau upaya untuk memberikan tanda peringatan bahwa bencana kemungkinan akan segera terjadi.

Pemberian peringatan dini ini harus menjangkau masyarakat (*accessible*), segera (*immediate*), tegas tidak membingungkan (*coherent*), bersifat resmi (*official*).

2. Saat Kejadian Bencana

Saat peringatan dini ataupun tanpa peringatan sekalipun namun bencana tetap terjadi maka di situlah diperlukan langkah-langkah seperti tanggap darurat untuk dapat mengatasi dampak bencana dengan cepat dan tepat agar jumlah korban atau kerugian dapat diminimalkan. Dalam tahap ini mencakup tanggap darurat dan bantuan darurat.

a. Tanggap Darurat (*response*)

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana. Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan pada tahap tanggap darurat, diantaranya yaitu:

- Pengkajian yang tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya
- Penentuan status keadaan darurat bencana
- Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana
- Pemenuhan kebutuhan dasar
- Perlindungan terhadap kelompok rentan
- Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital

b. Bantuan Darurat (*relief*)

Ini merupakan upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi dan juga air bersih.

3. Pasca Bencana

Setelah bencana terjadi dan setelah proses tanggap darurat dilewati, maka langkah berikutnya adalah tahap pasca bencana. Dalam tahapan ini mencakup pemulihan, rehabilitasi dan juga rekonstruksi, yaitu sebagai berikut:

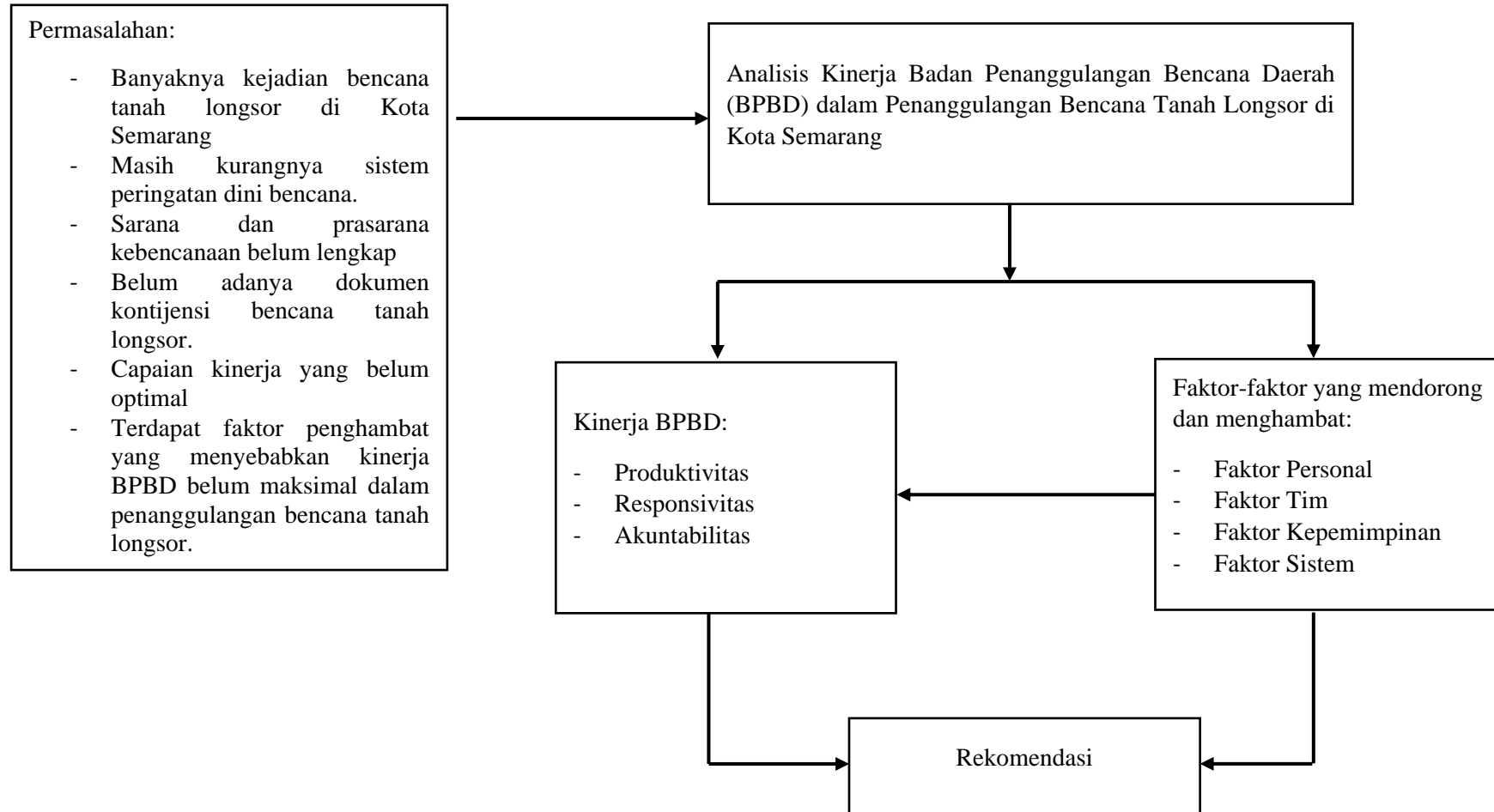
a. Rehabilitasi (*rehabilitation*)

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

b. Rekonstruksi (*reconstruction*)

Rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana dengan baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua prasarana, sarana dan sistem kelembagaan baik tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana. Lingkup pelaksanaan rekonstruksi terdiri atas program rekonstruksi fisik dan program rekonstruksi non fisik. Proses rekonstruksi tidak mudah dan memerlukan upaya keras dan terencana dan peran serta semua anggota masyarakat.

1.6.Kerangka Pikir Penelitian



1.7.Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep merupakan tahapan dimana peneliti berusaha menjabarkan pengertian dan karakteristik dari konsep penelitian yang digunakan beserta kemungkinan-kemungkinan operasionalnya. Pokok bahasan yang akan diteliti yaitu analisis kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana tanah longsor di Kota Semarang. Dalam penelitian ini difokuskan pada indikator kinerja menurut Dwiyanto yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi BPBD dalam penanggulangan bencana tanah longsor di Kota Semarang menggunakan indikator kinerja yaitu Produktivitas, Kuallitas Pelayanan, Responsivitas dan Akuntabilitas, sebagai berikut:

1. Indikator yang digunakan peneliti dalam menganalisis kinerja BPBD dalam penanggulangan bencana tanah longsor di Kota Semarang dalam setiap tahapan bencana yaitu melalui:

a. Produktivitas

Produktivitas yaitu pencapaian hasil dari BPBD Kota Semarang atas sumber daya dan sarana prasarana yang tersedia. Produktivitas secara umum merupakan kemampuan dalam memperoleh hasil yang optimal melalui penggunaan sumber daya yang ada di dalam organisasi secara efektif dan efisien. Hal ini dapat dilihat dari:

- Realisasi program dan kegiatan sesuai dengan target sasaran dalam penanggulangan bencana tanah longsor.
- Hambatan dalam merealisasikan program dan kegiatan
- Upaya dalam meningkatkan produktivitas kerja

b. Responsivitas

Responsivitas yaitu kemampuan BPBD untuk merespon atau menanggapi berbagai macam kebutuhan masyarakat secara tepat dan tepat serta mengembangkan program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, maka peneliti melihat dari:

- Terdapat atau tidaknya keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan BPBD Kota Semarang dalam penanggulangan bencana tanah longsor.
- Sikap aparatur dalam merespon atau menanggapi keluhan dari masyarakat dalam penanggulangan bencana tanah longsor
- Ketersediaan wadah untuk pengaduan
- Hambatan dalam merespon aduan masyarakat serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

c. Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu kewajiban pertanggungjawaban BPBD Kota Semarang untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang dilakukan BPBD Kota Semarang melalui transparansi layanan dan orientasi pelayanan yang berpihak terhadap masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban BPBD Kota Semarang terhadap masyarakat. Hal ini dilihat dari:

- Bentuk pertanggungjawaban BPBD Kota Semarang dalam penanggulangan bencana tanah longsor
- Bentuk transparansi BPBD Kota Semarang dalam penanggulangan bencana tanah longsor.
- Kendala yang dihadapi beserta upaya mengatasi untuk mencapai akuntabilitas publik yang diharapkan.

2. Selain indikator kinerja di atas, penelitian ini juga memfokuskan terhadap beberapa faktor menurut Mahmudi yang diasumsikan dapat mempengaruhi yaitu menghambat atau mendorong kinerja BPBD Kota Semarang. Indikasi yang diamati pada faktor pendukung dan penghambat kinerja BPBD Kota Semarang dalam penanggulangan bencana tanah longsor, yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Personal

Faktor personal adalah sesuatu atau aspek yang melekat pada diri seseorang individu yang mempengaruhi perilakunya, peneliti akan melihat dari:

- Keterampilan yang dimiliki petugas dalam penanggulangan bencana tanah longsor
- Komitmen yang dimiliki petugas dalam penanggulangan bencana tanah longsor

b. Faktor Kepemimpinan

Faktor kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain atau bawahannya dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan, peneliti akan melihat dari:

- Motivasi yang diberikan pemimpin kepada pegawai BPBD dalam penanggulangan bencana tanah longsor
- Peran pemimpin dalam memberi arahan kepada pegawai di BPBD dalam penanggulangan tanah longsor
- Peran pemimpin dalam pengambilan keputusan dalam penanggulangan bencana.

c. Faktor Tim

Faktor tim adalah sekumpulan orang yang memiliki ketrampilan yang saling melengkapi dan memiliki komitmen untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan suatu proses kerja bersama dimana mereka saling bertanggung jawab satu sama lain, peneliti akan melihat dari:

- Koordinasi antar pegawai dalam penanggulangan bencana tanah longsor.
- Dukungan yang diberikan pegawai kepada pegawai lain dalam melaksanakan tupoksinya dalam penanggulangan bencana tanah longsor.
- Kerja sama yang dilakukan antar pegawai dalam penanggulangan bencana tanah longsor.

d. Faktor Sistem

Faktor sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksud untuk mencapai suatu tujuan, peneliti akan melihat dari:

- Mekanisme sistem kerja dalam penanggulangan bencana tanah longsor.
- Penggunaan fasilitas sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana tanah longsor
- Penerapan sistem teknologi informasi modern dalam penanggulangan bencana tanah longsor

1.8. Metode Penelitian

1.8.1.Desain Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moeloeng (2011:4) tipe penelitian ini berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan, serta data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam Sugiyono (2016) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada kualitas atau kedalaman data yang dapat diperoleh. Metode deskriptif kualitatif lebih menekankan pada suatu analisis dan sekaligus penggambaran tentang suatu kondisi realitas yang ada sehingga hasil dari penelitian tersebut adalah banyak menggunakan kata-kata deskriptif (Septianan dan Widowati, 2018).

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dimana dalam penelitian ini peneliti mencoba menjelaskan bagaimana kinerja dan faktor-faktor pendukung dan penghambat kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana tanah longsor di Kota Semarang. Penggunaan pendekatan kualitatif pada penelitian ini, didasarkan atas pertimbangan bahwa pendekatan kualitatif lebih relevan untuk penelitian ini, mengingat permasalahannya sangat kompleks dan selalu berkembang.

1.8.2.Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan dalam bab terdahulu, maka situs penelitian ini adalah Kota Semarang, tepatnya di BPBD Kota Semarang yang beralamat di Kompleks Terminal Penggaron, Jl. Brigjen Sudiarto No.KM. 11, Penggaron Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50194.

1.8.3.Subjek Penelitian

Subyek penelitian merupakan individu dan atau kelompok yang diharapkan dapat menceritakan apa saja yang ia ketahui tentang sesuatu yang berkaitan dengan fenomena atau kasus yang sedang diteliti. Pada penelitian kualitatif responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan (Ardiansyah, 2017). Subyek penelitian inilah yang menjadi informan. Informan dalam penelitian ini meliputi informan kunci dan informan biasa. Informan kunci adalah pihak-pihak yang mengetahui berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian ini. Informan biasa adalah informan yang ditentukan dengan dasar pertimbangan mengetahui dan berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling dalam penentuan informan. Menurut Sugiyono (2016:60), purposive sampling yaitu teknik menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang memberikan data secara maksimal.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka yang menjadi informan atau subyek dalam penelitian ini adalah:

1. Informan kunci dalam penelitian ini yaitu Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang, dan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang.

2. Informan biasa dalam penelitian ini pegawai BPBD Kota Semarang.

1.8.4. Jenis dan Sumber Data

Data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka (Muhadjir, 1996). Berdasarkan sumber data yaitu terdapat data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, sedangkan data sekunder yaitu merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber pendukung penelitian yang dapat berupa buku atau media massa (Endri, 2011). Sebuah penelitian dilakukan untuk menggali dan mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seseorang atau pihak yang dipilih untuk menjadi narasumber atau responden. Dalam hal ini sumber daya yang diperoleh terdiri dari:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari informan atau narasumber yang dipilih oleh peneliti untuk memperoleh data-data atau informasi yang ada relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam hal ini, yang menjadi data primer antara lain pihak-pihak yang telah disebutkan dalam subyek penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa dokumen pendukung baik dari Berita Online, Badan Pusat Statistik (BPS) dan website BPBD Kota Semarang (bpbd.semarangkota.go.id) atau sumber lain yang relevan.

Penelitian kualitatif menggunakan data berupa teks, kata-kata tertulis, frasa-frasa atau simbol-simbol yang menggambarkan orang-orang atau tindakan-tindakan, dan peristiwa dalam kehidupan sosial. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan data yaitu berupa :

1. Teks, yaitu berupa dokumen atau berkas yang mengandung informasi dari BPBD Kota Semarang untuk mendukung penelitian ini.

2. Kata-kata tertulis, yaitu berupa kata-kata tertulis maupun ditulis narasumber atau peneliti yang mengandung informasi terkait dengan kinerja BPBD Kota Semarang dalam penanggulangan bencana tanah longsor.
3. Rekaman video maupun audio, merupakan rekaman gambar maupun suara yang mengandung informasi untuk mendukung penelitian.

1.8.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2016). Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari 3 macam yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Nasution (1988) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Observasi adalah pengamatan atau pencatatan terhadap suatu masalah yang diteliti dengan menggunakan panca indera. Sanafial Faisal (1990) mengklasifikasikan observasi menjadi observasi partisipatif, observasi terang-terangan atau tersamar, dan observasi tak terstruktur. Dalam penelitian ini jenis observasi yang digunakan yaitu observasi tak terstruktur. Observasi tak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi.

2. Wawancara

Esterberg (2002) mendefinisikan wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Kemudian Esterberg (2002) mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur dan tidak terstruktur. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara semiterstruktur. Jenis wawancara semiterstruktur ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview* (wawancara mendalam), dimana

dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat, dan ide-idenya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk lisan, tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2016). Dokumentasi dalam pengertian lain merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menganalisis isi media.

1.8.6. Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2016: 244) berpendapat bahwa teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2016).

Koponen dari analisis data yaitu reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting dan membuang yang tidak perlu. Kemudian penyajian data serta kesimpulan. Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu :

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal penting dan dicari tema dan pola yang muncul dari catatan lapangan, dimana reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian yang berorientasi kualitatif berlangsung.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang terorganisir yang kemudian dimungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan yang terus berkembang sebagai sebuah siklus dan penyajian data yang dilakukan dalam sebuah matrik maupun teks yang bersifat naratif.

3. Verifikasi (*Verification*)

Verifikasi atau penarikan kesimpulan merupakan sebagian dari suatu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Dimana kesimpulan-kesimpulan yang berkembang selama proses penelitian berlangsung diverifikasi untuk menghasilkan kesimpulan utuh mencakup hasil penelitian.

1.8.7. Kualitas Data

Adapun uji kualitas data bahwa setiap data penelitian harus memenuhi beberapa hal yaitu : 1) mendemonstrasikan nilai kebenaran, 2) menyediakan dasar agar dapat dilakukan penerapan, 3) memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya, 4) kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya (Sugiyono, 2016).

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji kualitas data dengan teknik triangulasi dan pengecekan anggota. Triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Sugiyono, 2016: 125). Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu :

1. Triangulasi sumber, yaitu menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik, yaitu menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi waktu, yaitu menguji kredibilitas data dengan mengecek hasil wawancara, observasi dan sebagainya dengan waktu dan situasi yang berbeda.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menggunakan pendekatan triangulasi sumber, dimana peneliti akan mendapatkan data dari beberapa pegawai BPBD Kota Semarang. Peneliti juga menggunakan member check dalam menguji kualitas data yang didapat dari informan, yaitu dengan melakukan pengecekan kembali data-data yang telah diperoleh dari informan penelitian dengan tujuan untuk memvalidasi data sehingga dapat menjadi data penelitian yang valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.